2021

# LAPORAN KINERJA TAHUNAN

BPK PERWAKILAN

PROVINSI BANTEN

***Laporan Kinerja***

***BPK Perwakilan Provinsi Banten***

***Tahun 2021***

**Integritas-Independensi-Profesionalisme**

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan tahapan dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK Perwakilan Banten sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020-2024. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten selama Tahun 2021 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan, hal ini tercermin dari skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021 yaitu sebesar 100,84.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Serang, 28 Januari 2022**
**BPK Perwakilan Provinsi Banten**
**Kepala Perwakilan,**

**Novie Irawati Herni Purnama**
**NIP 197511131995022001**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... 3

**BAB I** ..... 6

**PENDAHULUAN** ..... 6

**A. Latar Belakang** ..... 6

**B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 7

**C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 7

**D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 10

**E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 11

**BAB II** ..... 13

**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN** 13

**A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 13

**B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 20

**BAB III** ..... 24

**AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 24

**A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten** ..... 24

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan ... 25

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan ... 27

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ..... 27

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional ..... 29

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan ..... 31

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal ..... 32

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK ..... 33

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP ..... 34

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ..... 35

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan ..... 36

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi ..... 37

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi ..... 38

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran ..... 39

**B. Realisasi Anggaran** ..... 41

**BAB IV** ..... 42
**PENUTUP** ..... 42

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada pasal 13 Peraturan Menpan-RB menyatakan bahwa instansi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/ lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan. Selan itu dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021, maka perlu disusun Laporan Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Banten.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, yang mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK dengan cara membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.

## B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Satu dari tujuh unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah di wilayah Barat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung oleh beberapa satuan kerja (satker) eselon II, yaitu Auditorat VA dan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN V yang berkedudukan di Kantor Pusat, serta Perwakilan-perwakilan pada masing-masing provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V yang memiliki tugas dan fungsi pemeriksaan keuangan daerah, yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Entitas pemeriksaan di wilayah Perwakilan Banten terdiri dari sembilan entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Perwakilan Banten melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh masing-masing entitas pemeriksaan merupakan asersi terakhir yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

## C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

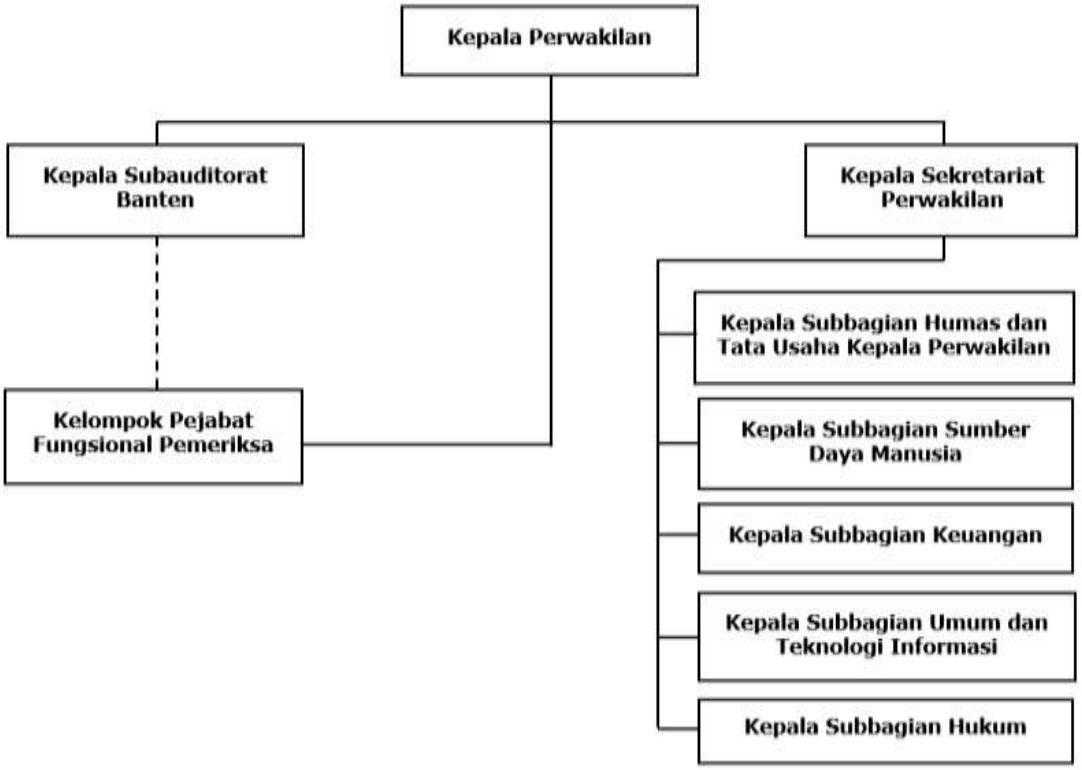


Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten

1. **Subauditorat Banten**

   Subauditorat Banten mempunyai tugas:

   a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

      1) merumuskan rencana kegiatan;
      2) mengusulkan tim pemeriksa;
      3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
      4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
      5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
      6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan

oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

**2. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten;
f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait

dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan

e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

## D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Banten posisi per Desember Tahun 2021 berjumlah 83 orang meliputi 7 personil struktural (terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 1 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 4 Kepala Subbagian), 27 personil di unit kerja penunjang pendukung dan 49 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat.

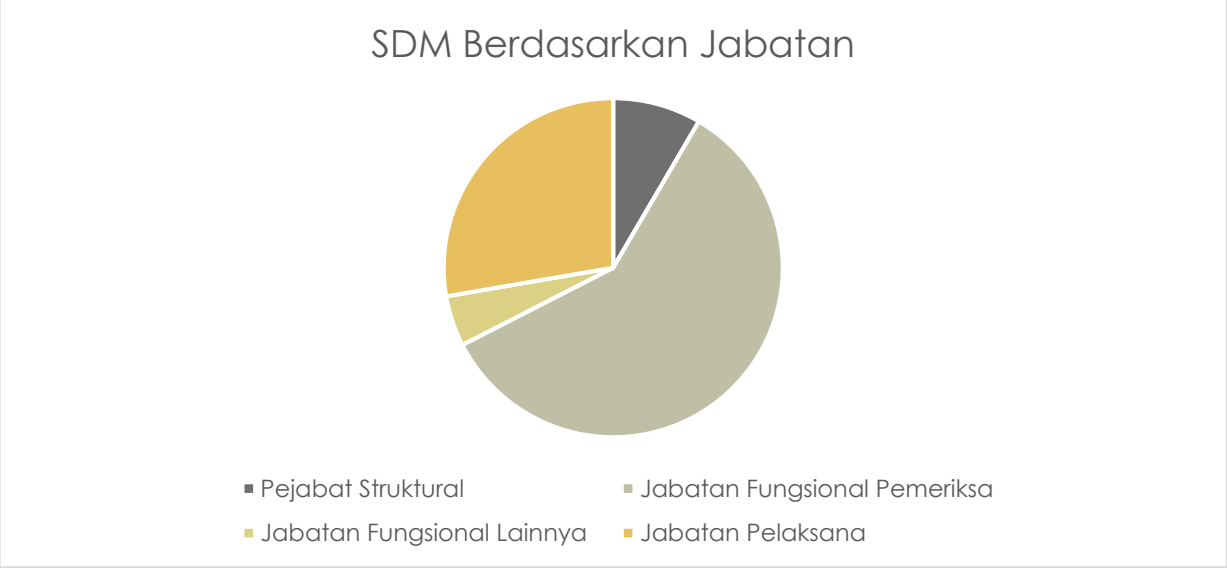


Gambar 2. Komposisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan

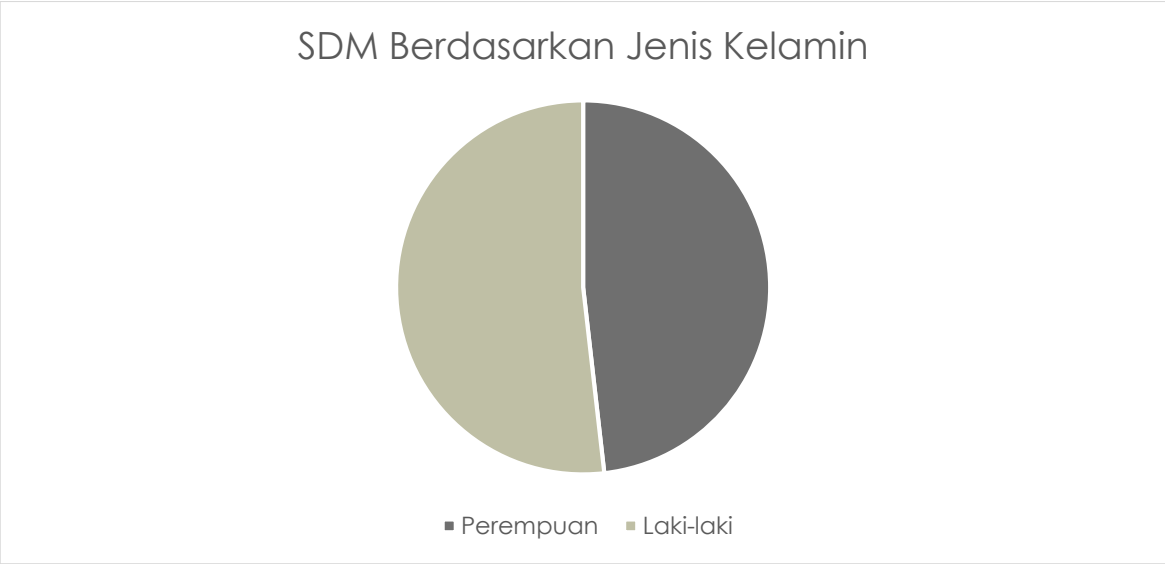


Gambar 3. Komposisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

## E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Banten awalnya menganggarkan kegiatan sebesar Rp19.425.714.000,00 direvisi menjadi Rp18.902.359.000,00 dikarenakan adanya pemotongan anggaran akibat perubahan sistem kerja, realokasi dan *refocussing* anggaran sebagai dampak atas pandemi Covid-19. Realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah sebesar Rp18.152.030.706,00 atau 96,03%.

Tabel 1. Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Banten

| Sasaran Kegiatan Dan Sasaran | Anggaran Sebelum Revisi | Anggaran Setelah Revisi |
|---|---|---|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Rp19.425.714.000,00 | Rp18.902.359.000,00 |
| • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | Rp7.724.432.000,00 | Rp8.986.820.000,00 |
| • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Rp11.701.282.000,00 | Rp9.915.539.000,00 |

# BAB II
# PERENCANAAN STRATEGIS
# DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

## A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten

BPK Perwakilan Provinsi Banten sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut:

**1. Visi**

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

## 2. Misi

Tujuan Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

a) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

b) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan

c) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK tersebut, sesuai dengan tusinya sebagai satuan kerja pemeriksa yang merupakan bagian dari Auditama Keuangan Negara V, dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Banten terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Banten, Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Banten berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun *output* yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi LHP, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Daerah, Hasil Penyelesaian Kerugian Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Daerah, Pertimbangan atas SAP, Pertimbangan pemeriksaan atas SPIP, dan Evaluasi BPK atas Pemeriksaan Akuntan Publik. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Banten akan memperkuat komunikasi positif dalam

menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Dukungan pada pernyataan misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Banten akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Banten juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Banten akan meningkatkan sinergi dengan Institusi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Banten berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan professional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada ahkirnya diharapkan mampu menjadi teladan (role model) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.

### 3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

a) Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b) Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c) Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selain nilai-nilai dasar di atas, BPK Perwakilan banten mempunyai falsafah dan budaya kerja yang dituangkan dalam slogan "JAWARA". Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Provinsi Banten sejak dahulu dikenal dengan keberanian dan spirit perjuangannya serta nilai-nilai kepahlawanan dan gudangnya orang sakti yang melahirkan para pejaung dan tokoh masyarakat yang dalam kalangan internal masyarakat disebut jawara. Kata-kata JAWARA kemudian dijadikan falsafah dan dijabarkan dalam ungkapan untuk meningkatkan etos dan spirit budaya kerja yaitu sikap Jujur, Ahli, Wibawa, Amanah, Religius dan Andal (JAWARA).

## 4. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Banten menetapkan tujuan sebagai berikut: "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

## 5. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 yaitu "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi".

BPK Perwakilan Provinsi Banten mendukung salah satu strategi BPK yaitu "Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif". Untuk mendukung strategi tersebut, BPK Perwakilan Banten menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Satker sebagaimana dalam visualisasi sebagai berikut.

Gambar 4. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN V, BPK Perwakilan Provinsi Banten sangat Mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Banten akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJPD 2005-2025 maupun RPJMD 2017-2022 baik secara

tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Banten berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Banten.

BPK Perwakilan Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN V, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu, "meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif".

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Banten menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi dalam gambar berikut:

Gambar 5. Visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Stategis, Arah Kebijakan, dan Sasaran

Perumusanan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Banten sebagai Lembaga Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Banten menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan

hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

a) BPK belum sepenuhnya menyesuaikan atau melakukan pemeriksaan terhadap tema-tema strategis lokal;

b) Tindak lanjut atas ganti kerugian daerah dan hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan;

c) Perlu peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK;

d) Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara terintegrasi dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;

e) Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK; dan

f) BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

a) Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu-isu strategis lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;

b) Persentase penyelesaian ganti kerugian daerah yang meningkat;

c) Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;

d) Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;

e) Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sarana prasarana yang mumpuni;

f) Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

## B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Berdasarkan sasaran strategis yang ada, Rincian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021 sebagai berikut:

## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

| Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran | | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Rp19.425.714.000 | 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% |
| • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | Rp7.724.432.000 | 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% |
| • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Rp11.701.282.000 | 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% |
| | | 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% |
| | | 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% |
| | | 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% |
| | | 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (5,00) |
| | | 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (87,00) |
| | | 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 96% |
| | | 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% |
| | | 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) |
| | | 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% |
| | | 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 87,50% |

## INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2021

| Sasaran Kegiatan dan Sasaran | | Keluaran | Indikator Kinerja Keluaran | Target |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | Laporan Hasil Pemeriksaan | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan | 100% |
| | | LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik | 100% |
| | | LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK | 100% |
| | | Bahan Perumusan Pendapat | Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat | 100% |
| | | Sumbangan IHPS | Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP | 100% |
| | | Laporan Profil Entitas | Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas | 100% |
| | | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% |
| | | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah | 100% |
| | | Laporan Interim/ Pendahuluan | Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan | 100% |
| | | Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan | 100% |
| | Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Manajemen Internal Perwakilan | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan | 100% |
| | | Layanan Sarana Internal | Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor | 1 Paket |
| | | | Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 1 Paket |
| | | | Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 1 Paket |
| | | Layanan Prasarana Internal | Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan | 1 Paket |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Layanan Perkantoran | Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 95% |
| | | | Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 95% |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Berdasarkan Validasi dari Direktorat PSMK, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,84%. Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021:

**INDIKATOR TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**

| Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran | | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Rp19.425.714.000 | 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% | 96% |
| • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | Rp7.724.432.000 | 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 100% |
| • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Rp11.701.282.000 | 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 84,05% |
| | | 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% | 100,31% |
| | | 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% | 100% |
| | | 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% | 100,45% |
| | | 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (5,00) | Sangat Memuaskan (4,51) |
| | | 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (87,00) | A (89,19) |
| | | 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 96% | 98,49% |
| | | 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 187,50% |
| | | 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) | Memuaskan (3,98) |
| | | 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 100% |
| | | 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 87,50% | 90,70% |

# IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Tabel 2. Realisasi *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Tahun 2021

| IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 96 | 100% | 96,00% | 72.50% | 100% | 100% | 100% |

Realisasi Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2021 adalah sebesar 96,00% atau di bawah target yakni 100,00%. Hal ini terjadi disebabkan hasil evaluasi EPP terhadap tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP di Tahun 2021 sebesar 80% disebabkan oleh reviu berjenjang dan reviu silang terhadap Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) belum berjalan dengan baik dan cermat. Atas hasil evaluasi tersebut telah disepakati dan dilakukan perbaikan. Untuk selanjutnya akan dibentuk tim khusus yang akan melakukan reviu laporan sebelum laporan tersebut terbit.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Banten adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021 sesuai dengan RKP sebagai berikut:

1. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten;
2. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung;

3. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang;
4. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang;
5. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tangerang;
6. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon;
7. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Serang di Serang;
8. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang;
9. LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat;
10. LHP atas Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten;
11. LHP atas Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
12. LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait lainnya di Pandeglang;
13. LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi terkait Lainnya di Banten;
14. LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten;
15. LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Banten;
16. LHP Kepatuhan atas Belanja Modal Jalan Irigrasi, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang; dan
17. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Ciputat.
18. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur dan Belanja Pemeliharaan Jalan Tahun Anggran 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten.

Pelaksanaan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada keluaran (1043.FAF.026) LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten dan (1043.FAF.092) LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan sebesar Rp4.656.384.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.515.147.719,00 atau 96,97%.

## IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tabel 3. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

| IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 100 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |

Realisasi pemenuhan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Banten turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi. Adapun Rekapitulasi Kesesuaian harapan penugasan dan realisasi pemeriksaan Tahun 2021 tersaji dalam **Lampiran 1.**

Pelaksanaan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada keluaran (1043.FAF.026) LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten dan (1043.FAF.092) LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan sebesar Rp4.656.384.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.515.147.719,00 atau 96,97%.

## IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 4. Realisasi IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2021

| IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 105 | 75% | 84,05% | 81,49% | 77,69% | 77.25% | 65.57% |

Realisasi atas Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) memperoleh skor 105. Skor tersebut diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (7.564) ditambah dengan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (11), dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* (9.125) yang menghasilkan nilai 84,05%. Lebih tinggi dari target kinerja tahunan yakni 75%.

Tabel 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021

| No. | Entitas | Temuan | Rekomendasi | Status Tindak Lanjut Rekomendasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TS | TBS | BT | TDT |
| | | Jml. | Jml. | Jml. | Jml. | Jml. | Jml. |
| 1 | Pemerintah Provinsi Banten | 732 | 1.577 | 1.166 | 250 | 161 | - |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Serang | 579 | 1.085 | 927 | 140 | 18 | - |
| 3 | Pemerintah Kota Serang | 294 | 605 | 500 | 92 | 13 | - |
| 4 | Pemerintah Kota Cilegon | 496 | 1.021 | 863 | 151 | 5 | 2 |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | 706 | 1.437 | 1.294 | 105 | 38 | - |
| 6 | Pemerintah Kota Tangerang | 468 | 869 | 760 | 101 | 6 | 2 |
| 7 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 321 | 621 | 556 | 44 | 18 | 3 |
| 8 | Pemerintah Kabupaten Lebak | 460 | 902 | 813 | 77 | 8 | 4 |
| 9 | Pemerintah Kabupaten Pandeglang | 540 | 1.008 | 685 | 210 | 113 | - |
| **JUMLAH** | | **4.596** | **9.125** | **7.564** | **1.170** | **380** | **11** |

Untuk mencapai target persentase tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan pembahasan TLRHP setiap semester serta melakukan percepatan TLRHP (Agustus s.d. September) dengan memedomani Nota Dinas Tortama KN V No.337/ND/XVIII/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal percepatan penyelesaian TLRHP dengan menyusun langkah-langkah percepatan, antara lain:

1. Melakukan Inventarisasi atas Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti (status 2) dan yang belum ditindaklanjuti (status 3) untuk periode mulai Tahun 2005 s.d. 2020;
2. Melakukan pengklasifikasian atas rekomendasi poin 1 di atas kedalam kategori rekomendasi yang bersifat administrasi dan rekomendasi yang bernilai kerugian/ setoran; dan
3. Mengidentifikasi penyebab belum ditindaklanjutinya rekomendasi oleh entitas dan usulan solusi penyelesaian rekomendasi dimaksud.

**Grafik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2017 s.d. 2021**

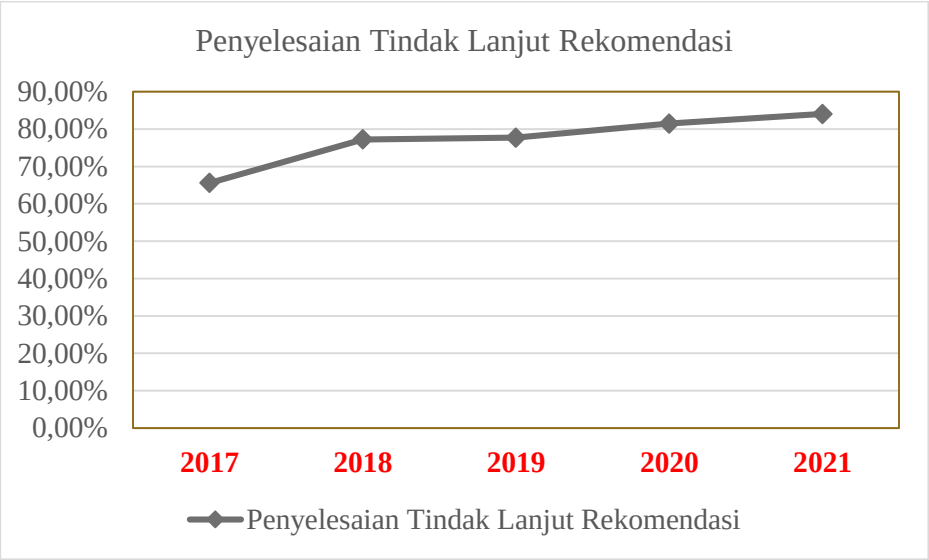


| Penyelesaian TLRHP | |
|---|---|
| **Tahun** | **Persentase** |
| 2017 | 65,57% |
| 2018 | 77,25% |
| 2019 | 77,69% |
| 2020 | 81,49% |
| 2021 | 84,05% |

Ketercapaian target tersebut didukung komitmen dan peran aktif seluruh aspek untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Pelaksanaan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada keluaran (1043.FAF.159) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten sebesar Rp104.396.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.396.000,00 atau 100,00%.

## IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam

satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 6. Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

| IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 100,31 | 100 | 100,31% | 100,75% | - | - | - |

Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional memperoleh skor 100,31. Skor tersebut diperoleh berdasarkan 3 (tiga) LHP Kinerja Tematik Nasional yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2021, ditambah Alokasi Penambahan Skor sebesar 0,31%. Realisasi menjadi 100,31%, lebih tinggi dari target kinerja tahunan yakni 100%.

Pemeriksan Tematik Nasional yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten, antara lain:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi terkait Lainnya di Banten;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten; dan
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Banten;

Pelaksanaan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada keluaran (1043.FAF.241) LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten

(1043.FAF.026) LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten sebesar Rp631.493.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 557.853.403,00 atau 88,34%.

## IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Tabel 7. Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

| IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | - | - | - |

Pada Tahun 2021 tidak ada permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli, namun pencapaian IKU ini tetap diberi skor 100%, karena tidak adanya permintaan perhitungan kerugian negara dan/atau pemberian Keterangan Ahli tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai IKU 5 Tahun 2021 adalah sebesar 100,00%.

Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan oleh Instansi Penegak Hukum saat ini ditujukan kepada Auditorat Utama Investigasi sesuai tupoksinya. Namun demikian, salah satu upaya BPK Perwakilan Banten untuk meningkatkan pemenuhan permintaan tersebut adalah dengan membentuk Tim *Investigative Audit Task Force* (IATF) di Lingkungan BPK Perwakilan Banten dengan menerbitkan Keputusan No.39/K/XVIII.SRG/11/2021 tanggal 12 November 2021.

Untuk pelaksanaan IKU ini menggunakan anggaran dari Auditorat Utama Investigasi (AUI), sehingga tidak dianggarkan dalam anggaran pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

## IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 8. Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

| IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 100,45 | 100 | 100,45% | 100,00% | - | - | - |

Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal memperoleh skor 100,45. Skor tersebut diperoleh berdasarkan 2 (dua) LHP Kinerja Tematik Lokal yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2021, ditambah Alokasi Penambahan Skor sebesar 0,45%. Realisasi menjadi 100,45%, lebih tinggi dari target kinerja tahunan yakni 100%.

Pemeriksan Tematik Lokal yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten, antara lain:

1. LHP atas Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa; dan
2. LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait lainnya di Pandeglang.

Pelaksanaan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada keluaran (1043.FAF.241) LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan (1043.FAF.026) LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten sebesar Rp618.042.000,00 dengan realisasi sebesar Rp545.011.100,00 atau 88,18%.

## IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Tabel 9. Realisasi IIKU 7 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK Tahun 2021

| IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 90,20 | 5 | 4,51 | 4,62 | 4,42 | 3,67 | - |

BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2021 memperoleh skor kinerja sebesar 90,20. Pada Tahun 2021 diperoleh skor Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 4,51 yang berada di bawah target yakni 5, namun pencapaian tersebut masih masuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi Nilai Dasar pada BPK Perwakilan Banten adalah sebagai berikut.

1. Pengarahan Kepala Perwakilan terkait penerapan Nilai Dasar BPK pada saat *Entry Meeting* dan pada saat pembekalan sebelum dilaksanakan pemeriksaan;
2. Pemberian teladan yang baik dari para Pimpinan (baik Pimpinan sebagai Role Model maupun sebagai Agen Perubahan) menjadi motivasi bagi pegawai untuk menerapkannya secara berkelanjutan; dan
3. Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui *Standing Banner*.

Pelaksanakan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada Keluaran (1043.274) Layanan Manajemen Internal Perwakilan, khususnya anggaran terkait kegiatan pembinaan oleh pimpinan sebesar Rp31.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.953.000,00 atau 99,98%.

## IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Tabel 10. Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2021

| IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 102,52 | A | A | A | A | BB | A |

Pada Tahun 2021 Perwakilan Provinsi Banten telah memperoleh skor 102,52. Skor tersebut diperoleh berdasarkan Nota Dinas Hasil Evaluasi AKIP dari Itama Nomor 268/ND/XI/09/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan nilai 89,19 yang melampaui target kinerja tahunan yakni 87,00.

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam mencapai IKU ini adalah secara rutin melakukan rapat internal perwakilan dalam rangka perencanaan dan evaluasi realisasi IKU triwulan berjalan. Selain itu, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten membuat perjanjian kinerja individu yang merupakan turunan dari SKP masing-masing pegawai.

Pelaksanakan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada Keluaran (1043.274) Layanan Manajemen Internal Perwakilan, khususnya anggaran terkait kegiatan Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko 34076000 sebesar Rp34.076.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.886.900,00 atau 99,45 %.

## IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive*, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 11. Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2021

| IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 102,59 | 96,00% | 98,49 % | 98,49% | 98,18% | 96,97% | 74,93% |

Pada Tahun 2021, Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor 102,59. Skor tersebut diperoleh berdasarkan Tingkat Pemanfaatan Layanan Dasar, Layanan Aplikasi Pemeriksaan, dan Aplikasi Manajemen Pengetahuan yang memperoleh skor 100% sedangkan Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Umum (SISDM) sebesar 93,94%. Total skor seluruhnya adalah 98,49% dari target kinerja sebesar 96%.

IKU ini tercapai dikarenakan dalam pelaksanaan tugas yang sudah memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Biro TI, seperti e-mail, aplikasi JASMIN, e-drive, aplikasi SiAP LK, aplikasi SMP, aplikasi SISDM, Aplikasi SMP , SiPTL serta Aplikasi PRISMA.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Banten juga membuat *best practice* yang membentuk database entitas pemeriksaan berbasis portal yaitu aplikasi *SmartDOSIR* . Aplikasi ini mencakup empat elemen utama data yaitu gambaran umum entitas, statistik belanja, indikator risiko kunci, serta berita dan informasi terkini terkait entitas guna Memenuhi kebutuhan data dan informasi oleh stakeholders dengan cepat, efisien dan mutakhir, terutama mendukung tim pemeriksa dalam menyusun perencanaan pemeriksaan yang memadai dengan metode *Risk Base Audit*.

Pelaksanakan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada Keluaran (1043.274) Layanan Manajemen Internal Perwakilan, khususnya anggaran terkait kegiatan Layanan umum dan TI sebesar Rp180.971.000,00 dengan realisasi sebesar Rp180.940.498,00 atau 99,98%.

## IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Tabel 12. Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2021

| IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rincian Aktifitas | Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Jumlah *Best-Practice* yang Disusun | 105 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tingkat Penerapan *Best-Practice* | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aktifitas Manajemen Pengetahuan | | | 18 | 11 | - | - | - |

BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2021 memperoleh skor 105 atas Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Skor tersebut diperoleh berdasarkan persentase penerapan manajemen pengetahuan 187,5% dari target kinerja 100%.

Untuk mencapai IKU tersebut, BPK Perwakilan Banten menerapkan beberapa kegiatan Manajemen Pengetahuan, yakni:

1. Menyampaikan 1 (satu) usulan *best practise* berjudul "SMARTDOSIR" Pelayanan Data Pemeriksaan yang Cepat, Efisien, dan Mutakhir berdasarkan Nota Dinas Hasil Penilaian No.26/ND/XII.1/01/2022 tanggal 12 Januari 2022;
2. Menerapkan 1 (satu) *best practice* berjudul "Sistem Informasi Pencarian Aset (SIPINSET)" yang disampaikan melalui nota dinas Nomor 289/ND/XVIII.SRG/12/2021 tanggal 1 Desember 2021; dan
3. Melaksanakan 18 (delapan belas) Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang disampaikan melalui nota dinas nomor 309/ND/XVIII.SRG/01/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Pelaksanakan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada Keluaran (1043.274) Layanan Manajemen Internal Perwakilan, khususnya anggaran terkait kegiatan Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia sebesar Rp322.459.000,00 dengan realisasi sebesar Rp321.800.230,00 atau 99,80%.

## IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Tabel 13. Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

| IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 104,74 | 3,80 | 3,98 | 3,77 | - | - | - |

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor kinerja sebesar 104,74. Skor Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah 3,98 yang berada diatas target yakni 3,80.

Untuk mencapai IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Banten meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan akademisi pemyediaan informasi penelitian mahasisawa dan praktik kerja lapangan di Kantor BPK Banten, melibatkan pemerintah daerah dan beberapa instansi lainnya untuk menjadi Pengurus IPKN Wilayah Banten, melibatkan IPH dalam kegiatan IATF, menghadiri undangan dan melakukan kunjungan delegasi. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjunjung nilai independensi, integritas dan profesionalisme BPK.

Pelaksanakan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada Keluaran (1043.994.002) Layanan Perkantoran, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, khususnya anggaran terkait kegiatan Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan sebesar Rp359.352.000,00 dengan realisasi sebesar Rp347.276.241,00 atau 96,64%.

## IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).

b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Tabel 14. Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2021

| IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 100 | 100,00% | 100,00% | 98,65 | 86,49% | 76,32% | 89,47% |

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor kinerja sebesar 100. Dari 73 pegawai sebanyak 73 orang memenuhi jam diklat sehingga realisasi jam diklat 100% sama dengan target 100%.

Hal yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk memenuhi IKU ini dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Membuat monitoring diklat setiap triwulan dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat PKN; dan
2. Mengusulkan diklat yang diselenggarakan di perwakilan agar dapat mengikutsertakan lebih banyak pegawai. Diklat yang dilaksanakan diperwakilan selama Tahun 2021, yakni Diklat Pemeriksaan LKPD untuk pemeriksa dan Diklat Pelayanan Prima untuk pegawai di lingkungan sekretariat perwakilan.

Untuk pelaksanaan IKU ini menggunakan anggaran dari Badiklat PKN, sehingga tidak dianggarkan dalam anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Banten.

## IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan

Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tabel 15. Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran
Tahun 2021

| IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Kompetensi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 2021 | Target 2021 | Capaian 5 (lima) Tahun | | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 103,66 | 87,50 | 90,70% | 91,83% | 88,50% | 86,42% | 85,68% |

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor 103,66. Skor tersebut diperoleh berdasarkan penilaian proporsi tingkat EKA 87,92% dan EPA 94,88% yang menghasilkan nilai akhir 90,70% dari target kinerja 87,5%.

Tercapainya target karena BPK telah memiliki hal-hal sebagai berikut.

a. Komitmen bersama dari satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
b. Penyelenggaraan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala) setiap triwulan. Forum ini bertujuan antara lain menyampaikan perkembangan kebijakan penganggaran dan implementasinya, mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan mencari solusi atas permasalahan yang ada; dan
c. Pengelolaan manajemen kinerja atas aspek implementasi Satuan Kerja yang menjadi bagian penilaian indikator kinerja keluaran.

Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran ini, BPK telah menyusun rencana aksi sebagai berikut:

a. Mempertahankan capaian kinerja anggaran Satuan Kerja yang berkategori "baik" dan "sangat baik" dan memperhatikan Satuan Kerja yang nilai kinerja anggarannya dalam kategori "cukup", "kurang", dan "sangat kurang";
b. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran; dan
c. Melakukan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK Satuan Kerja.

Pelaksanakan kegiatan IKU ini menggunakan anggaran yang terdapat pada Keluaran (1043.274) Layanan Manajemen Internal Perwakilan, khususnya anggaran terkait kegiatan Melaksanakan Layanan Keuangan sebesar Rp291.082.000,00 dengan realisasi sebesar Rp290.937.200,00 atau 99,95%.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

| Sasaran Kegiatan Dan Sasaran | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Rp18.902.359.000,00 | Rp18.152.030.706,00 |
| • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | Rp8.986.820.000,00 | Rp8.736.948.620,00 |
| • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Rp9.915.539.000,00 | Rp9.415.082.086,00 |

Rincian Realisasi anggaran dapat dilihat di **Lampiran 2**.

# BAB IV
# PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, dalam mencapai misi dan visi untuk terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah mencapai skor kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,84. Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; dan
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka pemenuhan target pada tahun berikutnya dengan cara:

1. *Review* berjenjang dan *review* silang atas KHP dilaksanakan dengan tertib dan cermat; dan
2. Menanamkan dan melakukan nilai-nilai dasar BPK kepada semua pegawai dalam berbagai acara atau kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Banten ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Lampiran 1

**INDIKATOR KINERJA TINGKAT KESESUAIAN HASIL PEMERIKSAAN YANG MEMENUHI HARAPAN PENUGASAN**
**PERIODE PENGUKURAN TAHUN 2021**

Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Banten
RKP : Tahun 2021
IKU : Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
Pengampu : Submit Renstra
Jumlah Pem. Keuangan : 9 entitas/objek
Jumlah Pem. Kinerja : 6 entitas/objek
Jumlah Pem. DTT : 3 entitas/objek (PDTT Non-Banparpol)

| No | Jenis Pemeriksaan | Tema/Fokus | |
|---|---|---|---|
| 1 | KINERJA | LHP | Kinerja Atas Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan Pangan Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Banten |
| | | Tema | Ketahanan Pangan |
| | | Fokus | aspek ketersediaan pangan, kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya, upaya Pemerintah Provinsi Banten, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Provinsi Banten |
| | | AO/tujuan pemeriksaan | menilai efektivitas peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan TA 2020 |
| | | Simpulan | Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan dalam aspek ketersediaan pangan oleh Pemerintah Provinsi Banten belum efektif, karena belum memiliki rencana peningkatan ketersediaan pangan yang memadai, belum memiliki sumber daya yang memadai, dan belum melaksanakan upaya peningkatan ketersediaan pangan secara memadai |
| | | | |
| 2 | KINERJA | LHP | Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sdm Berkualitas Dan Berdaya Saing Ta 2021 Dan Smt I 2021 Pada Pemprov Banten Dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | Tema | Pendidikan dan pelatihan Vokasi |
| | | Fokus | Peningkatan peran dan kerja sama Iduka dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidik vokasi, penguatan tata kelola pendidikan vokasi, dan penguatan sistem sertifikasi kompetensi |
| | | Objek Pemeriksaan | Pendidikan Vokasi pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Banten |
| | | AO/ tujuan pemeriksaan | menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Iduka dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk TA 2020 s.d. semester I 2021 |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan, yaitu Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki upaya yang memadai dalam memfasilitasi SMK untuk memperoleh kerja sama Iduka.<br>Apabila permasalahan signifikan tersebut tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Iduka dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. |
| | | | |
| | | LHP | Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Banten |
| | | Tema | Vaksin Covid-19 |
| | | Fokus | Pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistik, sarana dan prasarana vaksinasi covid-19 serta kegiatan pelayanan vaksinasi covid-19 |

| No | Jenis Pemeriksaan | Tema/Fokus | |
|---|---|---|---|
| 3 | KINERJA | Objek Pemeriksaan | Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten |
| | | AO/tujuan pemeriksaan | menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021 |
| | | Simpulan | BPK menyimpulkan bahwa efektivitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Banten dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki, yaitu pencatatan distribusi vaksin COVID-19 dan logistik belum seluruhnya real time dan kegiatan penjaringan data sasaran belum sepenuhnya menghasilkan data sasaran yang valid dan mutakhir.<br>Pemerintah Provinsi Banten perlu menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan di atas untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 |
| | | | |
| 4 | KINERJA | LHP | Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 Padapemerintah Kabupaten Serang Dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | Tema | Vaksin Covid-19 |
| | | Fokus | pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistik, sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19 serta upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19 |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Kabupaten Serang |
| | | AO/tujuan pemeriksaan | menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021 |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Kabupaten Serang belum menyusun kertas kerja perhitungan perencanaan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik dengan menggunakan variabel yang valid dan pendataan sasaran belum sepenuhnya sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.<br><br>BPK menyimpulkan jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan maka permasalahan tersebut dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 |
| | | | |
| 5 | KINERJA | LHP | PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEMUDAHAN BERUSAHA MELALUI PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA TA 2020 DAN 2021 (S.D. TW III) |
| | | Tema | Perizinan dan penanaman modal |
| | | Fokus | Kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Kabupaten Tangerang |
| | | AO/ tujuan pemeriksaan | menilai upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 s.d. Triwulan III |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan antara lain pelayanan perizinan belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai dan pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai .<br>BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan di atas untuk lebih meningkatkan upaya dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. |
| | | | |

| No | Jenis Pemeriksaan | Tema/Fokus | |
|---|---|---|---|
| 6 | KINERJA | LHP | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TA 2019 S.D. SMT I 2021 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA |
| | | Tema | Kemandirian Fiskal |
| | | Fokus | aspek regulasi, dukungan kelembagaan, ekstensifikasi dan intensifikasi, serta pengelolaan PAD |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Kota Pandeglang |
| | | AO/tujuan pemeriksaan | menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait lainnya |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum menetapkan perencanaan pengelolaan retribusi daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan belum seluruh perangkat daerah memiliki kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi.<br>BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mendorong kemandirian fiskal daerah |
| | | | |
| 7 | Kepatuhan/DTT | LHP | KEPATUHAN ATAS BELANJA MODAL NFRASTRUKTUR DAN BELANJA PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2021 (s.d. 30 NOVEMBER) PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA |
| | | Tema | SDGs Sustainable Transport |
| | | Fokus | persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima serta pembayaran |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Provinsi Banten |
| | | AO/tujuan pemeriksaan | Menilai apakah Belanja Modal Infrastruktur dan Belanja Pemeliharaan Jalan TA 2021 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan masih ditemukan ketidakpatuhan atas persiapan pengadaan yang mengakibatkan nilai HPS yang ditetapkan PPK tidak ekonomis dan akuntabel, pemilihan penyedia yang mengakibatkan menghilangkan kesempatan penyedia lainnya yang memenuhi kualifikasi dan pelaksanaan kontrak dan serah terima yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.<br><br>Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal Infrastruktur dan Belanja Pemeliharaan Jalan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021 (s.d. 30 November) untuk yang diuji petik, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam semua hal yang material. |
| | | | |
| | | LHP | KEPATUHAN ATAS BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA PEMELIHARAAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2021 (S.D 31 OKTOBER) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG |
| | | Tema | SDGs Sustainable Transport |
| | | Fokus | pelaksanaan belanja, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan dokumen pertanggungjawaban |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Kabupaten Tangerang |

| No | Jenis Pemeriksaan | Tema/Fokus | |
|---|---|---|---|
| 8 | Kepatuhan/DTT | AO/tujuan pemeriksaan | menilai apakah belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas TA 2021 (s.d 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan masih ditemukan ketidakpatuhan atas belanja perjalanan dinas, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan pelaksanaan belanja pemeliharaan, belanja modal bangunan gedung dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta ketepatan waktu pelaksanaan belanja modal, jalan, irigasi dan jaringan.<br><br>Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal Jalan, irigasi, jaringan, belanja-modal gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas TA 2021 (s.d. 31 Oktober) untuk yang diuji petik, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam semua hal yang material. |
| | | | |
| 9 | Kepatuhan/DTT | LHP | Kepatuhan Atas Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Serta Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 (S.D 31 Oktober) Pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
| | | Tema | SDGs Sustainable Transport |
| | | Fokus | pelaksanaan belanja, ketepatan waktu, dan kepatuhan dokumen pertanggungjawaban |
| | | Objek Pemeriksaan | Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
| | | AO/tujuan pemeriksaan | menilai apakah Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Tidak Terduga TA 2021 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| | | Simpulan | Hasil pemeriksaan masih ditemukan ketidakpatuhan atas pelaksanaan belanja jasa konsultansi, belanja bahan bangunan dan konstruksi, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja tidak terduga yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja.<br><br>Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja tidak terduga TA 2021 (s.d 31 Oktober) yang diuji petik, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden dan peraturan pelaksananya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam semua hal yang material. |

Lampiran 2

# Laporan Bulanan Satker Tahun 2021

## BPK Perwakilan Provinsi Banten

| No | Kode | Program/Kegiatan/Keluaran/Subkeluaran | Kegiatan | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target (Vol.) | Realisasi (Vol.) | Rencana | Realisasi(Rp) | Realisasi (%) |
| | **CI** | **Program Pemeriksaan Keuangan Negara** | | | **18.902.359.000** | **18.152.030.706** | **96,03%** |
| | 1043 | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara | | | 18.902.359.000 | 18.152.030.706 | 96,03% |
| **1** | **EAA** | **Layanan Perkantoran** | **1** | **1** | **9.476.525.000** | **8.981.264.814** | **94,77%** |
| | *994* | *Layanan Perkantoran* | *1* | *1* | *9.476.525.000* | *8.981.264.814* | *94,77%* |
| | 001 | Gaji dan Tunjangan | | | 5.654.453.000 | 5.212.590.879 | 92,19% |
| | A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | | 5.654.453.000 | 5.212.590.879 | 92,19% |
| | 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 3.822.072.000 | 3.768.673.935 | 98,60% |
| | A | Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan | | | 359.352.000 | 347.276.241 | 96,64% |
| | B | Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan | | | 38.400.000 | 38.400.000 | 100,00% |
| | C | Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia | | | 496.802.000 | 496.464.991 | 99,93% |
| | D | Layanan Perkantoran Bidang Keuangan | | | 247.800.000 | 241.848.000 | 97,60% |
| | E | Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI | | | 2.679.718.000 | 2.644.684.703 | 98,69% |
| **2** | **EAD** | **Layanan Sarana Internal** | **33** | **33** | **294.014.000** | **289.937.260** | **98,61%** |
| | *001* | *Layanan Sarana Internal* | *33* | *33* | *294.014.000* | *289.937.260* | *98,61%* |
| | C | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | | | 294.014.000 | 289.937.260 | 98,61% |
| | 53211 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | 160.514.000 | 156.500.000 | 97,50% |
| | 53212 | Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | | | 133.500.000 | 133.437.260 | 99,95% |
| **3** | **EAE** | **Layanan Prasarana Internal** | **1** | **1** | **145.000.000** | **143.880.012** | **99,23%** |
| | *001* | *Layanan Prasarana Internal* | *1* | *1* | *145.000.000* | *143.880.012* | *99,23%* |
| | 53311 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | 145.000.000 | 143.880.012 | 99,23% |
| **4** | **FAF** | **Pemeriksaan Keuangan** | **206** | **206** | **8.986.820.000** | **8.736.948.620** | **97,22%** |
| | *026* | *LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten* | *16* | *16* | *3.497.313.000* | *3.356.977.394* | *95,99%* |
| | 051 | Menyusun Perencanaan Pemeriksaan | | | 33.069.000 | 32.950.000 | 99,64% |
| | 052 | Melaksanakan Pemeriksaan | | | 3.009.067.000 | 2.869.966.194 | 95,38% |
| | 053 | Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan | | | 455.177.000 | 454.061.200 | 99,75% |
| | *061* | *LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Banten* | *93* | *93* | *152.806.000* | *152.805.550* | *100,00%* |
| | 051 | Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol | | | 152.806.000 | 152.805.550 | 100,00% |
| | *092* | *LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan* | *2* | *2* | *1.159.071.000* | *1.158.170.325* | *99,92%* |
| | 051 | Melaksanakan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK | | | 1.159.071.000 | 1.158.170.325 | 99,92% |
| | *116* | *Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan* | *1* | *1* | *11.064.000* | *10.657.000* | *96,32%* |
| | 051 | Menyusun Bahan Rumusan Pendapat | | | 11.064.000 | 10.657.000 | 96,32% |
| | *124* | *Sumbangan IHPS Perwakilan* | *2* | *2* | *58.334.000* | *58.193.000* | *99,76%* |
| | 051 | Menyusun Sumbangan IHPS | | | 58.334.000 | 58.193.000 | 99,76% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *132* | *Laporan Profil Entitas Perwakilan* | *9* | *9* | *6.525.000* | *6.490.800* | *99,48%* |
| | 051 | Menyusun Laporan Profil Entitas | | | 6.525.000 | 6.490.800 | 99,48% |
| | *159* | *Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Banten* | *18* | *18* | *104.396.000* | *104.394.980* | *100,00%* |
| | 051 | Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | | 104.396.000 | 104.394.980 | 100,00% |
| | *200* | *Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi* | *18* | *18* | *87.189.000* | *87.145.990* | *99,95%* |
| | 051 | Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah | | | 87.189.000 | 87.145.990 | 99,95% |
| | *241* | *LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten* | *14* | *14* | *2.147.331.000* | *2.061.507.885* | *96,00%* |
| | 051 | Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan | | | 2.147.331.000 | 2.061.507.885 | 96,00% |
| | A | Tanpa Subkomponen | | | 2.147.331.000 | 2.061.507.885 | 96,00% |
| | *273* | *Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan* | *12* | *12* | *350.403.000* | *348.506.598* | *99,46%* |
| | 051 | Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan | | | 350.403.000 | 348.506.598 | 99,46% |
| | A | Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan | | | 35.170.000 | 34.406.900 | 97,83% |
| | B | Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan | | | 259.582.000 | 259.573.098 | 100,00% |
| | C | Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | | 29.067.000 | 28.136.400 | 96,80% |
| | D | Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan | | | 12.300.000 | 12.211.000 | 99,28% |
| | E | Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD | | | 14.284.000 | 14.179.200 | 99,27% |
| | *274* | *Layanan Manajemen Internal Perwakilan* | *21* | *21* | *1.412.388.000* | *1.392.099.098* | *98,56%* |
| | 051 | Tanpa Komponen | | | 1.412.388.000 | 1.392.099.098 | 98,56% |
| | A | Melaksanakan Layanan Tata Usaha | | | 132.393.000 | 131.933.780 | 99,65% |
| | B | Melaksanakan Layanan Kehumasan | | | 146.660.000 | 146.434.490 | 99,85% |
| | C | Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia | | | 322.459.000 | 321.800.230 | 99,80% |
| | D | Melaksanakan Layanan Keuangan | | | 291.082.000 | 290.937.200 | 99,95% |
| | E | Melaksanakan Layanan Umum dan TI | | | 180.971.000 | 180.940.498 | 99,98% |
| | F | Melaksanakan Layanan Hukum | | | 247.519.000 | 234.968.000 | 94,93% |
| | G | Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK | | | 31.960.000 | 31.953.000 | 99,98% |
| | H | Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko | | | 34.076.000 | 33.886.900 | 99,45% |
| | I | Menyusun Perangkat Lunak | | | 25.268.000 | 19.245.000 | 76,16% |

Lampiran 3

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN TARGET LIMA TAHUN**

| Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Kinerja Lima Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Reali98 dibanding target Kinerja Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96,00% | 96,00% |
| Sasaran Strategi 1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Sasaran Strategi 2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 84,05% | 112,07% |
| | IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,31% | 100,31% |
| | IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| | IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,45% | 100,45% |
| | IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Memuaskan (5,00) | Memuaskan (5,00) | Memuaskan (5,00) | Memuaskan (5,00) | Memuaskan (5,00) | Memuaskan (4,51) | 90,20% |
| | IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP | A (86,00) | A (87,00) | A (88,00) | A (89,00) | AA (90,00) | AA( 89,19%) | 99,10% |
| | IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 95% | 96% | 97% | 98% | 100% | 98,49% | 98,49% |
| | IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 187,50% | 187,50% |
| | IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) | Memuaskan (3,80) | Memuaskan (3,80) | Memuaskan (3,80) | Memuaskan (3,80) | Memuaskan (3,98) | 104,74% |
| | IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| | IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran | 87,00% | 87,50% | 88,00% | 88,50% | 89,50% | 90,70% | 101,34% |

Lampiran 4

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**
**TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun Anggaran : 2021

| Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2021 | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (1) | |
| Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100 | 96 | 96% |
| | IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100 | 100 | 100% |
| Sasaran Strategi 1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75 | 84,05 | 112% |
| | IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100 | 100,31 | 100% |
| Sasaran Strategi 2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100 | 100 | 100% |
| | IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100 | 100,45 | 100% |
| | IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 5 | 4,51 | 90% |
| | IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP | 87 | 89,19 | 103% |
| | IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 95 | 98,49 | 104% |
| | IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100 | 187,5 | 188% |
| | IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | 3,8 | 3,98 | 105% |
| | IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100 | 100 | 100% |
| | IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran | 87 | 90,7 | 104% |